



Geopolitik, Ekonomi, dan Keamanan pada Negara Russia dan Armenia

Rima Saleha¹, Polit.Sc Henny Saptatia Drajati Nugrahani²

^{1,2} Sekolah Kajian Stratejik dan Global Program Studi Kajian Wilayah Eropa Univeritas Indonesia

Email: Rima.saleha@ui.ac.id¹, Henny.saptatia@ui.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini akan membahas mengenai kerja sama antara Russia dan Armenia pada bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak apa yang didapatkan atas hasil kerja sama, serta memverifikasi kepentingan yang terdapat pada kedua negara. Analisis dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Politik Luar Negeri untuk menjelaskan kebijakan kedua negara serta kepentingannya dan melihat faktor penyebab kerja sama, sedangkan Resolusi Konflik digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan peran Rusia dalam membantu Armenia dalam mencapai stabilitas kawasan Eurasia. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif dan untuk mendapatkan data yang faktual, metode pengumpulan data didapatkan melalui pernyataan pejabat atau pemimpin negara Armenia dan Rusia, serta melalui situs internet atau artikel jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapatnya interdependensi antar kedua negara yang menjadi kepentingan nasionalnya, kepentingan Rusia untuk memiliki pengaruh dan Armenia untuk mendapat aliansi yang dapat melindunginya dalam eskalasi konflik adalah salah satu tujuan terjadinya kerjasama. Kerjasama dilakukan berupa hubungan bilateral, dan melalui institusi, ini telah menghasilkan banyak manfaat bagi pembangunan, keamanan, dan posisi Armenia di kawasan Eurasia.

Kata kunci: Armenia, Ekonomi, Keamanan, Politik, Rusia

Abstract

This research will be discussing cooperation between Russia and Armenia in the politic, economy, and security sectors. This research aimed to understand the impact of what has been obtained over the cooperation, also to verify the interest that each country has. The analysis on this article using two theories, Foreign Policy to explain the policy of each country also their interest, and the Conflict Resolution used to explain the Russia role on helping Armenia to attain the stability on Eurasia region. The research method used on this paper is Descriptive Qualitative and to obtain the factual information, it will be using the source from official remarks, such as President, or other important stakeholders of each country, while also gathering data from official websites, also journal articles. This research has shown that there is interdependence between both countries that forming a national interest to each country. Russia's interest to influence and Armenia's interest to having an alliance that could cooperate in case of escalation of conflict is one of the reason the cooperation being held. Cooperation was done by bilateral or through institution. This has done tons of benefit in terms of development, security, and better position of Armenia in Eurasia region.

Keywords: Armenia, Economy, Politic, Russia, Security

PENDAHULUAN

Politik Luar Negeri nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Yang mana kebijakan luar negeri itu dijalankan oleh pemerintah suatu negara yang memang bertujuan untuk mencapai

kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara – negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. lebih lanjut menurut Rosenau, apabila kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*external need*) termasuk di dalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut, nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, intitusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara–bangsa.

Eropa seringkali dipahami sebagai sebuah realitas baik dalam artian historis, kultural, geografis maupun sebagai sebuah identitas. Tetapi, pemahaman ini tentu saja sangat menyesatkan. Sebagai kata yang sering kita gunakan tanpa kita merasa perlu mempertanyakannya, Eropa sebenarnya bukanlah sebuah realitas tunggal dan baku, melainkan sebuah realitas yang sangat beragam dan kompleks, yang selalu berubah dan direka ataupun direka ulang. Mungkin karakter-karakter ini tidak eksklusif Eropa. Tetapi, karakter-karakter ini menjadi menarik dalam kaitannya dengan Eropa setidaknya karena dua hal. *Pertama*, sejarah Eropa menunjukkan adanya pola yang menarik yang ditandai dengan dinamika hubungan antara krisis dan transformasi sebagai produk dari penyelesaian krisis. *Kedua*, pengaruh dari dinamika yang terjadi tidak terbatas secara geografis di Eropa tetapi juga menyebar ke berbagai belahan bumi yang lain.

Ada beberapa faktor yang ada di Eropa, yang tidak dimiliki oleh kawasan lain, yang membentuk peran unik Eropa di dunia modern. Pengaruh Eropa di dunia bermula dari ekspansi dan pendudukan teritorial di wilayah-wilayah di luar Eropa, kemudian diperkuat dengan pengaruh politik, ekonomi, kultural dan bahkan spiritual Eropa serta dengan perpindahan serta bermukimnya orang-orang Eropa di wilayah-wilayah yang didudukinya. Dinamika tentu saja bukan karakter eksklusif politik di Eropa. Tetapi, pengaruh yang melampaui batas-batas geografisnya, menjadikan dinamika politik di Eropa sangat unik, salah satunya pola hubungan antara Rusia dan Armenia yang tertuang dalam tulisan ini.

Rusia pasca-Perang Dingin bukan sebuah negara dengan kekuatan ideologi yang kuat seperti Uni Soviet (Light, 2004) Namun perlu dicatat bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami sebuah krisis identitas yang memunculkan banyak pemikiran-pemikiran mengenai identitas nasional Rusia. Menurut Margot Light, paling tidak ada tiga paradigma utama mengenai identitas di Rusia saat ini. Ketiga paradigma tersebut adalah liberal westernist, pragmatic nationalist, dan fundamental nationalist (Light, 2004). Liberal westernist atau dalam bahasa Rusia disebut zapadniki beranggapan bahwa fokus utama Rusia adalah modernisasi, yang hanya bisa dicapai melalui kerjasama dengan Barat. Para penganut zapadniki, seperti Andrei Kozyryev (Menteri Luar Negeri pertama Federasi Rusia) dan German Gref (Kepala Center for Strategic Studies), beranggapan bahwa kerjasama dengan Barat akan menunjukkan bahwa Rusia dan negara-negara eks-Soviet lainnya bisa menjadi mitra kerjasama yang potensial (Piotrowski 2002). Ini dilandaskan pada asumsi kultural bahwa Rusia merupakan bagian dari daratan Eropa. Pemikiran ini menganggap bahwa Rusia harus melupakan impiannya menjadi bangsa besar di Eurasia maupun menjadi jembatan antara Eropa dan Asia, melainkan seharusnya Rusia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari Eropa dan seharusnya memakai nilai-nilai Eropa (Light 2004, 43). Kelompok kedua adalah kelompok fundamental nationalist. Kelompok ini sering juga disebut vielkorossy (Great Russians). Pemikiran ini mendasarkan pemikirannya pada pandangan-pandangan eurasianis dan geopolitik klasik yang menganggap bahwa Eurasia merupakan entitas geografis, kultural, dan ekonomi tersendiri yang terlepas dari Eropa maupun Asia (Light 2004, 43). Pemikiran-pemikiran eurasianisme fundamentalis ini menganggap bahwa Rusia adalah bagian dari sebuah

entitas geografis Eurasia. Keberadaan Eurasia secara langsung akan menyebabkan konsekuensi logis bahwa orang-orang yang tinggal di kawasan Eurasia memiliki kesamaan nilai-nilai kultural, dan orang-orang tersebut harus ditampung didalam satu entitas negara (Laruelle, 2008)

Geopolitik memiliki arti secara luas yang merujuk pada hubungan Negara antara politik dan teritori dalam skala lokal hingga Internasional. Geopolitik secara tradisional adalah studi tentang bagaimana kekuatan politik diperkuat atau dirusak oleh pengaturan geografis (batas, koalisi, jaringan spasial, sumber daya alam, dll). Menurut Dijkink, Geopolitik juga menunjukkan keputusan praktis para pemimpin politik dan sosial sehubungan dengan pengaturan geografis (G.Dijkink, 2009) ataupun letak geografis suatu wilayah. Sedangkan geografi politik berkaitan dengan politik dan geografi dan apa yang dapat dilihat sebagai 'geografi kekuasaan'. Seperti yang dikemukakan oleh D. Storey, geografi politik terus berkembang dan mencakup beragam perhatian, pendekatan, dan metode (D.Storey, 2009). Dari sekian banyak konsep yang berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan geopolitik sebagai subdisiplin ilmu, Geopolitik Kritis hadir sebagai konsep dimana asumsi atas letak geografis akan menitikberatkan sebagaimana suatu negara dapat memiliki 'klaim' atas keputusan politik yang dibuatnya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tatanan politik global. Diutarakan dalam buku berjudul *International Encyclopedia of Human Geography*, bahwa 'Geopolitik kritis' mendekonstruksi asumsi tentang dunia di balik keputusan tersebut (G.Dijkink, 2009). Konsep dasar di balik geopolitik kritis adalah bahwa para intelektual negara bagian membangun gagasan tentang tempat; Ide-ide ini memiliki pengaruh dan memperkuat perilaku politik dan pilihan kebijakan mereka, dan ide-ide ini memengaruhi cara orang memproses gagasan mereka sendiri tentang tempat dan politik (Fouberg, Erin H., Alexander B. Murphy, and H. J. de Blij., 2012). Geopolitik juga memiliki keterkaitan atau bisa juga di sebut salah satu cabangnya seperti Geoekonomi dan juga akan berkaitan pada keamanan suatu negara yang berkaitan pada tema tersebut. Sehingga dalam hal ini mengaitkan pada tema diatas bahwa Geopolitik pada Negara Russia dan Armenia dalam hal Kerjasama dalam bidang Ekonomi, politik dan juga Keamanan.

Pada konflik Nagorno-Karabakh merupakan sejarah yang tercatat pada salah satu hubungan Russia dan Armenia yang dimana konflik ini merupakan konflik persengkataan wilayah dan juga konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan yang secara de facto dikuasai oleh Republik Nagorno-Karabakh yang diproklamasikan sendiri, tetapi secara Internasional diakui oleh Sebagian dari Azerbaijan. Konflik ini berasal dari abad ke-20, meskipun konflik ini yang sekarang dimulai ditahun 1988 dan meningkat menjadi perang berskala penuh pada awal 1990-an. Ketegangan sporadis dan pertemuan diperbatasan terus berlanjut di wilayah itu meskipun suatu perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani di tahun 1944. (Lieberman, 2006) Perang ini dikenal sebagai perang pembebasan Artsakh di Armenia dan Nagorno-Karabakh yang salah satu konflik bersenjata yang terjadi ditahun 1980-an hingga Mei 1994, di daerah kantong Nagorno-Karabakh Barat daya Azerbaijan antara etnis mayoritas Armenia dari Nagorno-Karabakh didukung oleh Armenia dengan Republik Azerbaijan. Sehingga Armenia dan Azerbaijan merupakan keduanya bekas dari Uni Soviet. Pada Kedua Negara mendeklarasikan perang di pegunungan Karabakh karena Azerbaijan berusaha untuk mengekang Gerakan *separatisme* di Nagorno-Karabakh. Parlemen daerah kantong telah memberikan suara mendukung kemerdekaan. Permintaan untuk menyatukan dengan Armenia, yang dimulai pada tahun 1988, mulai dilakukan dengan relatif damai. Tetapi, pada bulan berikutnya, saat pembubaran Uni Soviet semakin dekat, secara bertahap tumbuh menjadi konflik kekerasan yang semakin meningkat antara etnis Armenia dan Etnis Azerbaijan, yang memunculkan klaim pembersihan etnis dari kedua belah pihak (Rieff, 1997).

Dalam konflik ini Russia merupakan salah satu aktor global dalam hal tujuan maupun cara-cara yang dilakukan, dengan melalui perubahan yang di pimpin oleh Vladimir Putin, Russia kembali menguatkan dan mengintegrasikan pada perannya di dunia politik dan juga ekonomi dunia. Meskipun *hard power* masih menjadi hal yang terpenting, tetapi Russia menggunakan *Soft Power* dalam menggunakan pengaruhnya dan

menghimpun pada pengaruh (*Leverage*) pada kekuatan militernya. Dengan melalui Kerjasama dibanding konfrontasi yang menjadikan Russia berusaha untuk melakukan normalisasi Dunia (Penkova, 2008).

Russia memandang negara-negara Post-Soviet sebagai prioritas kebijakan luar negerinya, dalam tekanan-tekanan secara langsung tidak lagi digunakan. Russia memanfaatkan peninggalan historisis dan ikatan budaya untuk menjadi mediator alami sebagai orientasi kebijakan luar negeri (Sargsyan, 2003). Sejak disepakatinya rezim gencatan senjata tahun 1994, Russia memainkan leading role dalam negosiasi berdasarkan kerangka kerja dari Minsk Group dalam konflik Nagorno-Karabakh yaitu antara Armenia dan Azerbaijan (Kiss, 2008). Konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh menarik dari sudut pandang hubungan internasional karena merupakan konflik yang berlarut-larut atau berkepanjangan. Meskipun telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, lebih dari dua puluh tahun belum ada penyelesaian yang dicapai sehingga berdampak negatif terhadap Kaukasus secara keseluruhan (Tadevosyan, 2010).

Ada ketertarikan untuk melihat dengan seksama keterlibatan Rusia dalam upaya resolusi konflik Nagorno-Karabakh disebabkan adanya problematika yang ditunjukkan oleh posisi Rusia yang dilematis yaitu sebagai player (pemain) sekaligus mediator. Keterlibatan Rusia sebagai pihak ketiga sudah ada sejak dimulainya konflik. Rusia merupakan negara pertama dan negara kunci dimulainya proses negosiasi. Kala itu terjadi konflik terbuka antara Armenia dan Azerbaijan pada tahun 1991 hingga 1994 yang diawali oleh aksi militer Azerbaijan sebagai reaksi penolakan pernyataan Parlemen Eropa yang berniat mengakui kemerdekaan Nagorno-Karabakh. Konflik terbuka diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata melalui penandatanganan Bishkek Document pada bulan Mei 1994 di Bishkek. Rusia merupakan negara yang membawa Armenia dan Azerbaijan masuk ke dalam kesepakatan ini.

Ditinjau dari historinya, Rusia telah terlibat di dalam pergolakan Nagorno-Karabakh. Dapat dikatakan Nagorno-Karabakh menjadi sumber masalah antara Armenia dan Azerbaijan sebenarnya dipengaruhi oleh kebijakan Stalin pada tahun 1920-an ketika saat itu menjadi pemimpin Uni Soviet. Stalin melakukan pembagian beberapa wilayah di Kaukasus yang dimaksudkan untuk menghindari adanya perlawanan, termasuk penetapan Nagorno-Karabakh menjadi wilayah otonomi khusus yang disebut Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast (NKAO) pada tahun 1924. Sejak saat itu, Armenia dan Azerbaijan terlihat semakin bersaing untuk mengontrol Nagorno-Karabakh. Kerumitan status Nagorno-Karabakh juga dipengaruhi perubahan-perubahan kebijakan Uni Soviet. Contohnya, pada tahun 1960-an Uni Soviet berencana memasukkan Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan namun pada tahun 1989 Gorbachev mengubah rencana tersebut dengan memasukkan Nagorno-Karabakh ke dalam teritorial Armenia yang akhirnya memicu aksi militer dari Azerbaijan.

Saat ini, posisi Rusia sebagai pemain dalam dinamika konflik Nagorno-Karabakh dapat dilihat dari level geopolitik. Beberapa pendapat mengatakan bahwa secara geopolitik, Rusia dipandang mengambil keuntungan dalam status quo konflik ini. Melalui partisipasi Armenia dalam CSTO (Collective Security Treaty Organization) (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, 2013), Rusia dapat meraih keuntungan melalui kerjasama yang terjadi, seperti penempatan pangkalan militernya yang terus diperpanjang hingga 2044 di Armenia. Rusia menjadikan Armenia sebagai alat untuk menjaga keseimbangan di wilayah Kaukasus Selatan karena melihat Azerbaijan semakin kuat secara ekonomi dan militer (Ozkan, 2008). Selain meraih keuntungan di bidang militer, Rusia mengambil sektor-sektor ekonomi penting Armenia melalui akuisisi aset-aset energi. Blokade ekonomi yang dilakukan Azerbaijan kepada Armenia menghambat pertumbuhan ekonomi Armenia sehingga ada ketergantungan ekonomi terhadap Rusia. Rusia juga semakin tertarik dengan Azerbaijan terkait perkembangan rute alternatif transportasi energi dari Caspia Basin (pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan) (Poghosyan, 2009).

Jika dilihat konflik tersebut bahwa Kerjasama Russia dan Armenia sedang berjalan dalam ekonomi, politik, dan juga keamanan yang berawal dari peperangan untuk menjadikan suatu kepentingan negara

dalam penyelesaian konflik tersebut. Jika diambil pada Kerjasama ini bahwa Armenia akan dibantu oleh Russia dalam bidang Ekonomi, politik dan juga keamanan tidak hanya penyelesaian kasus konflik Nagorno-Karabakh tetapi juga menjadikan Kerjasama ini untuk membentuk suatu kepentingan negara dalam tujuan pada kedaulatan suatu Negara.

Bagian ini akan meninjau beberapa penelitian atau berupa jurnal yang akan menjadikan sebagai tinjauan Pustaka. Pada penelitian pertama berupa Jurnal yang berjudul Keterlibatan Rusia dalam upaya Resolusi Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan di tahun 2008-2012 oleh **Ensi Adisty Kristiani** dalam Jurnal Unair, Kerangka pemikiran yang digunakan dalam mengetahui garis besar yaitu Resolusi Konflik yang memiliki arti bahwa pendekatan yang komprehensif untuk memberikan ruang dan kemampuan bekerjasama menyelesaikan konflik dengan cara-cara non kekerasan. Dalam jurnal ini menggunakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, data yang digunakan adalah data sekunder baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dan kuantitatif yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan kualitatif

Penelitian kedua berupa jurnal yang berjudul Konflik Armenia dan Azerbaijan serta upaya damai masyarakat Internasional oleh **DPR RI** dalam Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI didalam Jurnal ini juga tetap adanya keterlibatan Rusia dan juga Turki karena Konflik Nagorno-Karabakh memang sangat terlibat kedua negara khususnya Rusia yang menjadikan implikasi yang sangat besar karena keduanya saling mendukung yang berbeda Turki yang selalu mendukung Azerbaijan dan memiliki hubungan yang sangat erat tetapi Turki tidak ada hubungan pada Armenia. Rusia juga memiliki hubungan dengan Armenia dan juga Azerbaijan tetapi dengan kedua negara tersebut Rusia tetap melakukan hubungan erat di bidang Kerjasama dengan Armenia dan membantu Armenia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan posisi Rusia saat ini sebagai penengah dan untuk menyarankan melalui resolusi konflik. Sehingga memunculkan damai masyarakat Internasional dengan mengambil solusi damai atas konflik yang dapat disampaikan oleh PBB dan masyarakat Internasional lainnya. Dan juga beberapa organisasi lainnya meminta untuk mengambil resolusi konflik seperti Minsk Group merupakan badan usaha yang dibentuk ditahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk mengatasi konflik tersebut.

METODE

Dalam metode penelitian kualitatif terpilih menjadi metode yang akan digunakan oleh penulis. Hal ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada pengumpulan data terbuka melalui tinjauan pustaka, analisis data, teks atau gambar, serta menginterpretasikan atas temuan-temuan dalam penelitian. Menurut Ali dan Yusof dalam mendefinisikan metode kualitatif yaitu "*Any investigation which does not make use of statistical procedures is called "qualitative" nowadays, as if this were a quality label in itself.*" (Ali, 2011)" Dalam metode penelitian ini juga jika dilihat dari sifatnya memiliki banyak jenis, yang fokus pada metode penelitian dilihat dari sifatnya yaitu Deskriptif yang memiliki arti metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Sehingga pada metode penelitian yang dapat diambil Kualitatif yang bersifat Deskriptif karena penelitian ini sangat berhubungan dengan penjelasan tidak berdasarkan dari angka dan juga menggambarkan kejadian – kejadian awal mulanya hingga sekarang yang termasuk konflik berlarut atau berkepanjangan

Kerangka Pemikiran

Politik Luar Negeri

Pada teori Politik Luar Negeri pada dasarnya merupakan "*Action Theory*", atau kebijaksanaan suatu negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. (Perwita, 2005) Secara umum Politik Luar Negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia Internasional. Suatu komitmen yang pada

dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu Internasional atas lingkungan sekitarnya.

Dalam mempelajari politik luar negeri, ada sebuah diktum yang berlaku universal berbunyi politik luar negeri selalu dilandasi oleh kepentingan nasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional negara-bangsanya. Tujuan nasional sebenarnya merupakan elaborasi kepentingan-kepentingannasionalnegara bangsa tersebut (Morgenthau, 1977) Dalil universal ini menunjukkan hubungantidakterpisahkan antara politik luar negeri sebagai alat/instrumen interaksi negara bangsa dalam politikinternasional selalu didorong dan dikendalikan oleh motivasi mencapai kepentingan nasional tertentu. Hubungan ini berlaku dalam tataran konseptual maupun empiris.

Kajian Politik Luar Negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya. (James N, 1980)

Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan conflict resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (Levine, 1998) adalah :

1. tindakan mengurai suatu permasalahan,
2. pemecahan
3. penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Menurut pendapat Nicholson (Nicholson, 1991) “conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable”. Berdasarkan definisi menurut Nicholson tersebut resolusi konflik menjadi suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik. Sebagaimana Kriesberg (Kriesberg, 2006) mendefinisikan resolusi konflik sebagai “conducting conflicts, constructively, even creatively”. Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (Coleman, 2006) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta keahlian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang

bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan (Hugh Miall, 2002).

PEMBAHASAN

Kerjasama Rusia dan Armenia di bidang Ekonomi

Pada pemerintahan Serzh Sargsyan presiden Armenia pernah menyatakan bahwa pemerintahan Armenia memang menekankan aspek militer dan keamanannya pada pihak Rusia, dan berupaya untuk mendapatkan keuntungan dalam aspek ekonomi dengan pihak Uni Eropa lewat DFCTA. “Russia is our military security choice, while the DCFTA is our economic choice. This is not a Contradiction. Serzh sargsyan menyatakan bahwa penyesuaian Armenia untuk masuk kedalam ECU dapat dilakukan Armenia dengan memperkuat hubungan bilateral antara Armenia dan Rusia “ In addition, a number of mechanisms for the utilization of important privileges and benefits, which are being used among the countries of the Customs Union, have already been agreed upon for Armenia on a bilateral basis.” Armenia dan Rusia juga saling berkerjasama untuk masuk ke ECU yang akan memberikan keuntungan bagi Armenia lewat kerjasama ekonomi antar negara yang beranggotakan didalam organisasi ECU sehingga hubungan bilateral Armenia dan Rusia memainkan peranan penting dalam perekonomian Armenia, “currently, to import a ton of goods from Moscow via railways we, I mean our businesses, unfortunately, spend \$190 just for one ton of goods. It’s dreadful price. I am not even speaking about other things. The same goes for Exports. I have great hopes on this issue.”

Wakil perdana Menteri Mher Grigoryan “Rusia tidak hanya memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan kami, tetapi juga menempati posisi penting dalam perekonomian negara kami. Rusia adalah mitra dagang utama Armenia. Ini sebuah negara. Pada 2019, perdagangan bilateral kami melebihi \$ 2 miliar. Omset perdagangan tahun ini tumbuh dua digit.” Pashinyan juga mengatakan bahwa Armenia tertarik pada rekonsiliasi yang lebih dalam dan integrasi timbal balik antara ekonomi Armenia dan Rusia, yang harus didasarkan pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja dan uang. “Kami percaya penting untuk melanjutkan konvergensi dan integrasi ekonomi, yang harus didasarkan pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja dan modal. Selanjutnya, Uni Ekonomi Eurasia mendukung tujuan strategis ini. Kami memperkuat dan mengembangkan sistem, dan jelas bahwa kita perlu mendiversifikasi hubungan bisnis kita.” Menurut Pashinyan, Rusia juga merupakan pemimpin dalam berinvestasi di Armenia dan memainkan peran luar biasa dalam pembangunan infrastruktur negara itu. “Dalam investasi kami baru-baru ini, kami ingin fokus pada transfer teknologi untuk memproduksi vaksin Sputnik Light, yang sangat penting bagi kami dalam memerangi pandemi,” Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sambutannya kepada peserta forum bahwa Rusia dan Armenia memiliki aliansi, komunikasi politik yang benar, dan kerja sama yang menguntungkan di banyak bidang. Presiden Rusia mengatakan KTT akan memulai upaya baru untuk membantu memperkuat kerja sama yang produktif dan mendukung proses integrasi di ruang Eurasia.

Dengan melalui EAEU merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk di tahun 2015 untuk meningkatkan Kerjasama ekonomi dan meningkatkan taraf hidup anggotanya. Negara Anggotanya terdiri dari Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Eurasian Economic Union merupakan organisasi kerja sama ekonomi regional yang dibentuk 29 Mei 2014. Bagi pengamat barat, organisasi ini merupakan proyek Rusia untuk mengintegrasikan negara-negara Eurasia secara politik dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kembali kekuasaan masa lalu Uni Soviet. Kenyataannya hingga saat ini, EAEU lebih menarik bagi negara-negara di kawasan lain untuk bekerja sama daripada kawasan bekas Uni Sovyet. Negaranegara ASEAN dan dunia memberi perhatian yang cukup tinggi pada kerja sama EAEU. kawasan EAEU menyimpan potensi yang menjanjikan sebagai mitra ekonomi baru, namun masih sedikit yang

dimanfaatkan. Negara-negara EAEU juga kaya akan sumber daya alam minyak dan gas, power generation, besi, baja, pupuk serta machinery. Anggota EAEU memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 2,4 triliun, nilai perdagangan luar negeri sebesar USD 872 miliar, wilayah seluas lebih dari 20 juta km² (sekitar 15 % daratan dunia), dan dengan jumlah populasi 182,1 juta jiwa.

Ditahun 1991 Armenia ketertarikan adanya ketertarikan untuk bergabung *The Commonwealth of Independent States* (CIS). Piagam CIS sendiri terdiri dari 9 bagian dan terdiri dari 45 pasal yang membahas berbagai hal dari keanggotaan hingga pendanaan dalam tubuh CIS. Berdasarkan piagam tersebut tujuan utama dari CIS adalah, implementasi kerja sama di bidang politik, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan, budaya dan bidang-bidang lainnya; pembangunan ekonomi dan sosial yang komprehensif dan seimbang antar negara anggota CIS dalam rangka mewujudkan kerja sama dan integrasi penuh; menjaga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, norma hukum internasional dan dokumen *The Conference of Security and Co-Operation in Europe* (CSCE). pada September 1993 kepala negara dari negara anggota CIS menandatangani perjanjian pembentukan economic union untuk mewujudkan pergerakan yang bebas dari barang-barang, jasa, tenaga kerja dan modal investasi antar negara; untuk mengelaborasi keuangan, pajak, harga barang, bea cukai, dan kebijakan ekonomi eksternal antar negara; untuk menyatukan metode dalam mengatur kegiatan ekonomi dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan produksi.

Kerjasama Politik Armenia dan Rusia

Dengan melalui kerjasma Regional dan bilateral menjadikan negara-negara eksuni soviet menjalin hubungan Kerjasama yang sangat Erat termasuk Armenia dan Rusia. Dari kerjasama bilateral antara Rusia dan Armenia, kerjasama organisasi EAEU, kerjasama Organisasi CIS juga memiliki potensi yang sangat besar bagi kedua negara Armenia dan Rusia. Awal mula politik luar negeri tersebut melalui perjanjian pesahabatan kedua negara. Kerjasama dan pendampingan yang menguntungkan. Pada 29 agustus 2015 yang isinya Rusia akan melindungi Armenia apabila tersebut diserang oleh pihak lain. Rusia merupakan negara penentu keamanan di Kawasan tersebut dan telah membuktikan kesetiaan aliansi untuk Armenia. Walaupun sepertinya merupakan sebuah tanggapan terhadap pertikaian militer yang sedang terjadi antara Rusia dengan Amerika Serikat di daratan Transkaukasus, kesepakatan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski begitu, Armenia tetap dalam kebijakan luar negerinya bahwa walaupun menerima jaminan perlindungan keamanan dari Rusia, Armenia tetap tidak mau ikut campur dalam pertikaian yang tengah dihadapi Rusia dengan Amerika Serikat. Sehingga Armenia membuka kedutaan besarnya di moskow, dan menempatkan konsulat jendralnya di Dony Rostov dan Sankt Peterburg, serta menempatkan konsulat kehormatannya di Kaliningrad dan Sochi. Dan juga Rusia membuka kedutaan besarnya di Yerevan dan menempatkan konsulat jendralnya di Gyumri.

Di masa konflik Nagorno-Karabakh Sekertaris dewan keamanan Armenia, Armen Grigoryan, dalam siarannya di televisi nasional mengungkapkan bahwa ia telah meminta bantuan Rusia dan secara resmi mengajukan perjanjian 1997, "Kami perlu menegaskan bahwa terjadi lagi serangan terhadap wilayah kedaulatan Armenia yang dilakukan pasukan Azerbaijan. Untuk itu kami mengajukan permohonan ke Rusia dengan seruan untuk mempertahankan integritas teritorial Armenia dalam kerangka perjanjian yang ada antara Armenia dan Rusia tahun 1997." Perjanjian tentang persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik antara Rusia dan Armenia ditandatangani pada 29 Agustus 1997 untuk periode awal 25 tahun. Perjanjian itu dan secara otomatis diperpanjang sepuluh tahun sampai kedua belah pihak meminta penghentiannya. Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia serta pasukan penjaga perdamaian di daerah kantong Nagorno-Karabakh tempat perang tahun lalu berlangsung.

Melalui Organisasi ECU Putin mengajak Armenia untuk bergabung Dalam menanggapi hal ini, Presiden Serzh Sargsyan kemudian mengkonfirmasi bahwa Armenia akan berintegrasi dengan ECU dan turut berpartisipasi aktif dalam pembentukan Eurasia Economic Union (EEU). Mendengar pernyataan Serzh Sargsyan mengenai keputusan Serzh Sargsyan untuk bergabung dengan ECU, pihak parlemen Armenia pada tanggal 10 September 2013 melakukan pertemuan dengan tujuan untuk mendiskusikan mengapa hal tersebut dapat diputuskan tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu dengan pihak parlemen. Dalam pertemuan ini, pihak parlemen Armenia memanggil Menteri Luar Negeri Armenia Edward Nalbandian untuk menjelaskan apa alasan yang mendasari keputusan dari presiden tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan tidak dipublikasikan. Namun, keputusan parlemen Armenia dapat dilihat dari pernyataan Ketua Parlemen Armenia Hovik Abrahamyan yang pada tanggal 12 September 2013 menyatakan bahwa keputusan Armenia untuk bergabung dengan ECU dapat memperkuat perkembangan ekonomi dan politik di Armenia. Dan pemerintah Armenia dapat mencabut kembali proposal keanggotaan ECU ketika dalam dokumennya terdapat hal-hal yang dapat merugikan Armenia.

Melalui CIS yang dipimpin oleh Rusia Armenia menjadi anggota yang mendapatkan keuntungan ekonomi maupun secara politik Pada awal berdirinya, banyak perusahaan-perusahaan dunia yang menganggap wilayah negara eks-Soviet ini menjadi pasar potensial baru yang bisa dieksplorasi. Kebanyakan pelaku perdagangan internasional memang menyarankan Rusia. Hal ini dirasa wajar karena Rusia memiliki wilayah dan sumber daya yang sangat luas, dan diantara negara eks-Soviet lainnya sehingga Rusia memiliki posisi tawar yang paling tinggi dikarenakan hal tersebut. Dalam hubungannya dengan Armenia Presiden Vladimir Putin pada sebuah pertemuan dengan Presiden Armenia pada Maret 2017 menyatakan bahwa selama 25 tahun terakhir hubungan Armenia dan Rusia telah mencapai pada kondisi yang sangat baik dan bisa dikatakan sebagai sekutu dari Rusia. Armenia dan Rusia menurut Putin bekerja sama hampir dalam segala arah dan bidang, pada organisasi internasional baik dalam CIS maupun organisasi internasional lainnya Armenia dan Rusia selalu menjadi rekan kerja.

Pada kebijakan luar negeri Armenia dalam keanggotaanya di Organisasi Eurasian Customs Union yang menjadikan kerjasama ini dinilai sangat erat pada hubungan politiknya. Pada tanggal 3 September 2013, Presiden Armenia Serzh Sargsyan telah mengungkapkan bahwa pemerintah Armenia siap untuk bergabung dengan Eurasian Customs Union (ECU) yang diprakarsai oleh Rusia. Kesepakatan Armenia ini membuat Armenia berada bersama dengan Rusia, Belarusia, serta Kazakhstan yang sebelumnya dikenal sebagai pelopor dari ECU tersebut. Hal ini sangatlah bertolak belakang jika dilihat dari berbagai kebijakan yang diumumkan dan dilakukan oleh Armenia sebelumnya.

Serzh Sargsyan dengan pertimbangan persepsinya pada perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor regional dan aktor non-negara tersebut kemudian mendorong pemerintah Armenia untuk bekerjasama dengan ECU lewat pernyataannya pada tanggal 3 September 2013 dalam pertemuan dengan Vladimir Putin.

"We also had a substantive exchange of views on Eurasian integration issues, and I confirmed Armenia's desire to join the Customs Union and get involved in the process of creating the Eurasian Economic Union."

Hasil negosiasi Serzh Sargsyan yang menyatakan Armenia masuk ke ECU di tanggal 3 September 2013 menjadi titik awal bagi perubahan kebijakan luar negeri Armenia. Pada tanggal 10 September 2013, Majelis Nasional Armenia melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Edward Nalbandian terkait keputusan Serzh Sargsyan yang tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak parlemen. Pada tanggal 12 September 2013, Hovik Abrahamyan selaku speaker dari Majelis Nasional Armenia menjelaskan bahwa masuknya Armenia ke ECU merupakan hal yang sangat menguntungkan secara ekonomi dan politik. Pihak Majelis Nasional tersebut juga menyatakan bahwa pihak Armenia dapat mengundurkan diri dari ECU ketika terdapat dokumen dalam roadmap yang dapat merugikan Armenia.

Kerjasama Keamanan Rusia dan Armenia

Dengan melalui kerjasama keamanan Armenia sebagai Eks Uni Soviet menjadikan keamanan Armenia tetap terjaga yang sesuai pada perjanjian di tahun 1997 Armenia dan Rusia mendirikan hubungan kerjasama di bidang keamanan. Melalui kebijakan luar negeri Armenia Dalam prinsip pemerintahan Serzh Sargsyan, Wakil Menteri Luar Negeri Armenia Shavarsh Kocharyan menyatakan bahwa pemerintah Armenia memang menekankan aspek militer dan keamanannya pada pihak Rusia Presiden Armenia tersebut juga menunjukkan bahwa peran CSTO di Armenia merupakan hal yang tak dapat dipungkiri. Ia menyatakan bahwa CSTO adalah sebuah organisasi keamanan yang dapat memberikan garansi keamanan bagi Armenia dalam kasus konflik Nagorno Karabakh. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa kerjasama strategis yang dijalankan oleh Armenia dengan pihak Rusia berperan sebagai inti dari keamanan Armenia itu sendiri. "*The Armenia-Russia strategic allied partnership remains the nucleus of Armenian Security. We also attach extremely serious importance our membership in the Collective Security Treaty Organization which we see as the real guarantee of Armenia security.*" Dalam menanggapi adanya transaksi yang dilakukan oleh Rusia kepada Azerbaijan, Menteri Pertahanan Armenia Seyran Ohanian menyatakan bahwa persenjataan Azerbaijan dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak Armenia dan menyatakan bahwa Presiden Serzh Sargsyan sedang memikirkan untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam negosiasi yang dilakukan pada tanggal 3 September 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa pihak Rusia bersedia untuk memberikan bantuan untuk penyesuaian yang dilakukan Armenia agar dapat masuk ke ECU. Dan menyatakan bahwa masuknya Armenia ke ECU tentu akan memberikan keuntungan bagi Armenia lewat kerjasama keamanan dan juga ekonomi antar negara-negara anggota ECU. Serzh Sargsyan kemudian memprakarsai masuknya Armenia ke ECU dengan alasan bahwa hal tersebut adalah keputusan rasional yang berbasis pada kepentingan nasional Armenia. Keputusan rasional ini menurutnya yakni, untuk meningkatkan kesejahteraan Armenia dengan mengintegrasikan Armenia dengan distributor utama sumber daya energi Armenia dan menciptakan perdamaian di regional Armenia dengan mempertahankan dan memperkuat pasukan keamanan di Armenia. Pada tanggal 2 Oktober 2013, dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan persenjataan, Armenia kembali melakukan pertemuan dengan Rusia yang kemudian menghasilkan sebuah perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut tertuang bahwa Armenia akan mendapatkan suplai senjata dari Rusia dengan harga domestik Rusia atau dengan kata lain Armenia akan mendapatkan harga yang lebih murah dibanding Azerbaijan dalam pembelian senjata Rusia. Dengan melalui kerjasama Organisasi CIS juga mendapatkan prinsip-prinsip Internasional, norma hukum Internasional dan dokumen the conference of security and co-operation in Europe (CSCE) dengan adanya kerja sama antar negara anggota dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif dalam mengurangi pengeluaran negara dibidang militer dan persenjataan, mengeliminasi nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya, dan mencapai tujuan pelucutan senjata secara total; membantu warga negara anggota CIS dalam memperluas dan membebaskan komunikasi, kontak dan perpindahan antara warga negara anggota CIS; resolusi yang damai dalam penyelesaian sengketa dan konflik antara negara anggota CIS.

SIMPULAN

Permasalahan utama yang dialami Armenia pada saat ini adalah dalam sektor pembangunan dan keamanan. Oleh karena itu, upaya keanggotaan Armenia pada ECU ditujukan agar mendapatkan bantuan perekonomian yang lebih besar dari Russia. Terdapatnya keterlibaan Armenia dalam institusi atau organisasi regional, akan mempermudah investasi rusia dalam bidang ekonomi untuk masuk ke Armenia. Ini akan berdampak besar bagi perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan Armenia. Kehadiran Armenia dalam

organisasi seperti ECU, EEU, EAEU, dan CIS, akan memberi dampak yang signifikan bagi Armenia untuk mempertahankan dan memperjelas posisinya pada konflik Nagorno-Karabakh dan mendapatkan bantuan moral maupun ekonomi dari organisasi-organisasi dimana Armenia adalah anggotanya.

Keanggotaan Armenia dan Russia dalam CIS memperlihatkan perkembangan yang besar dalam kerja sama antar kedua negara dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Rusia sendiri menjadikan CIS sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan negara pasca Soviet dengan menghubungkan peninggalan historism dan ikatan budaya sebagai dasar kerja sama negara anggotanya. Adanya kerja sama dengan Rusia akan membuat Armenia dapat memiliki posisi di Kawasan Eurasia, sementara Rusia dapat menjaga pengaruhnya di wilayah tersebut dengan menjaga stabilitas keamanan, guna menjalankan kepentingan nasionalnya di wilayah tersebut.

Temuan bahwa kerja sama antar Armenia dan Russia juga berdasar pada terdapatnya keharusan Armenia untuk memiliki negara besar yang berpihak pada Armenia jika terdapat permasalahan kawasan, seperti layaknya Azerbaijan, negara yang menjadi ancaman keamanan Armenia mendapat dukungan dari Turki, hubungan yang erat dengan Rusia akan menjadi sebuah jaminan jika terjadi eskalasi konflik di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. &. (2011). Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability. *Issues in social and environmental Accounting*.
- Coleman, D. M. (2006). *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage.
- D.Storey. (2009). Political Geography. In R. K. Nigel Thrift, *International Encyclopedia of Human Geography* (p. 243). Amsterdam: Elsevier. doi:<https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00794-X>
- Fouberg, Erin H., Alexander B. Murphy, and H. J. de Blij. (2012). *Human Geography: People, Place, and Culture* (10th ed.). Hoboken.
- G.Dijkink. (2009). Geopolitics and Religion. In R. K. Nigel Thrift, *International Encyclopedia of Human Geography* (p. 453). Amsterdam: Elsevier. doi:<https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00778-1>
- Hugh Miali, D. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- James N. R. (1980). *The Scientific study of foreign Policy*. New york: The Free Press.
- Kiss, A. (2008). Russia and the South Caucasus: Managing Contradictions. *FakProjekt*.
- Kriesberg. (2006). *Conflict Resolution*.
- Laruelle, M. (2008). *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Levine. (1998). *Conflict Resolution*. Retrieved from Webster Dictionary.
- Lieberman, B. (2006). *Terrible Fate: Ethnic Cleansing in the Making of Modern Europe*. Chicago: Ivan R. Dee.
- Light, M. (2004). In Search of an Identity: Russian Foreign Policy and the End of Ideology. In R. Fawn, *Ideology and National Identity in Post-Communist Foreign Policies*. London: Frank Cass Publishers.
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus. (2013, May 1). *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus*. Retrieved from Collective Security Treaty Organization: <http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/cddd96a3f70190b1.html>
- Morgenthau, H. J. (1977). *Politics Among Nation*. New York: McGrown-Hill.
- Nicholson, M. (1991). *Resolution: The Role of Rational Approaches and Their Criticism*. New Directions in Conflict Theory:Conflict Resolution and Conflict Transformation.
- Ozkan, G. (2008). Rising Tension in the Caucasus. *International Strategic Research Organization*.
- Penkova, S. G. (2008). Russia: just a normal great power? *ISPI Working Paper Issue*, 34.
- Perwita, b. a. (2005). *Pengantar ilmu hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poghosyan, T. (2009). THE ARMENIAN ENP AND CONFLICT RESOLUTION IN NAGORNO KARABAKH. *Crisis Management Initiative*.

- Rieff, D. (1997). without rules or pity. *Council on Foreign Relations*.
- Sargsyan, I. (2003). International Mediation in Theory and Practice: Lesson of Nagorno-Karabakh. *Armenian Center for National and International Studies*.
- Tadevosyan, M. (2010). Nagorno-Karabakh Conflict : War, Humanitarian Challenge, and Peace Keeping. *Journal of Conflict Transformation*.